

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(r1sty_n@yahoo.com; afrizal.pg@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah ringkasan dari Laporan Keuangan Pemeriksaan Hasil Pemerintah Provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penelitian ini, sampel termasuk 30 provinsi dengan periode pelaporan 3 tahun. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hal itu menunjukkan bahwa belanja modal dan jumlah penduduk memberikan efek positif yang signifikan pada tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: tingkat pengungkapan, tingkat ketergantungan, lokal-generated pendapatan, belanja modal, penduduk, temuan audit, akuntansi pemerintahan.

ABSTRACT

This study is aimed to analyze the factors affecting the level of disclosure in the financial statements of the provincial governments in Indonesia. The subjects in this study are the Summary of Financial Statements Examination Results of Provincial Governments in Indonesia conducted by the Supreme Audit Agency (BPK). In this study, the sample included 30 provinces with a 3-year reporting period. Samples were selected using purposive sampling method. The analytical tool used is multiple regression analysis. Based on the analysis that has been done, it shows that the capital expenditure and number of population give significant positive effects on the level of disclosure in the financial statements of the provincial governments in Indonesia.

Keywords: level of disclosure, level of dependence, Locally-Generated Revenue, capital expenditures, population, audit findings, government accounting.

PENDAHULUAN

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan laporan keuangan yang diberikan melalui laporan tahunan (*annual report*). Agar pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*). Menurut Soemarso (2003) terdapat dua kategori pengungkapan yang digunakan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders*. Pertama, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17

Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah semua informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kategori yang kedua yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yang berarti pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh suatu entitas tanpa diharuskan peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Penelitian terkait dengan pengungkapan laporan keuangan belum banyak dilakukan pada laporan keuangan pemerintahan dibandingkan perusahaan, disebabkan karena terbatasnya informasi pemerintah yang dapat diakses publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari pengungkapan. Penelitian ini menggunakan pengungkapan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat *mandatory* sehingga lebih mengukur ketaatan

dibandingkan dengan pengungkapan (Hilmi, 2011).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Hilmi (2011) berdasarkan karakteristik pemerintah yaitu tingkat ketergantungan, berdasarkan kompleksitas pemerintah yaitu jumlah penduduk dan berdasarkan hasil temuan audit yaitu temuan audit. Ada dua variabel yang ditambahkan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2011).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Tingkat ketergantungan, Pendapatan Asli Daerah dan temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan *Signalling* dalam Pemerintahan

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan *agent*, sehingga *agent* tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*.

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara

memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, serta penjelasan lebih detail dalam pengungkapan. Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik (Evans, J, Patton 1987).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004) Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 menjelaskan belanja modal merupakan belanja PEMDA yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan (Zulfikar, 2013).

Temuan Audit

Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kreadibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dengan memeriksa keuangan, kinerja, serta pemeriksaan lain dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan BPK tersebut berupa temuan, opini, kesimpulan, serta dapat pula berbentuk rekomendasi.

Temuan audit merupakan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada laporan keuangan berupa kerancuan dan ketidaksesuaian dengan realisasi laporan serta terindikasi sebagai suatu pelanggaran. Menurut ISO 9000, temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau mendapatkan peluang perbaikan. Ketidaksesuaian tersebut merupakan penyimpangan dengan adanya bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan. Auditor harus menginvestigasi secara tepat untuk menentukan kriteria audit yang dilanggar dan menentukan rekomendasi tindakan perbaikan (Zulfikar, 2013).

Pengembangan Hipotesis Tingkat Ketergantungan

Liestiani (2008), Martani dan Lestari (2010), Puspita (2011) dan Hilmi (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan. Semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar terhadap sumber dana lain untuk membiayai aparaturnya. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dana Pemerintah pusat maka daerah tersebut memiliki tekanan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak.

H1: *Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat Pengungkapan*

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Amalina (2014) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, sementara itu penelitian Puspita (2011) menyebutkan bahwa ratio PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Semakin baik kinerja pemerintah semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan. PAD merupakan salah satu pengukuran dari kekayaan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka menunjukkan semakin baik pula kinerja daerah tersebut. Maka semakin besar dorongan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan *stakeholders*.

H2: *Rasio PAD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan*

Belanja Modal

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi keinginan pemerintah untuk mengungkapkan informasi laporan keuangannya.

Mustikarini dan Fitriyani (2012), Zulfikar (2013) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah maka semakin baik pula pengungkapan yang dilakukan.

H3: *Belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan*

Jumlah Penduduk

Liestiani (2008), Hilmi (2011), Puspita (2011) menemukan bahwa jumlah penduduk

berkorelasi positif terhadap tingkat pengungkapan. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintahan. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan.

H4: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

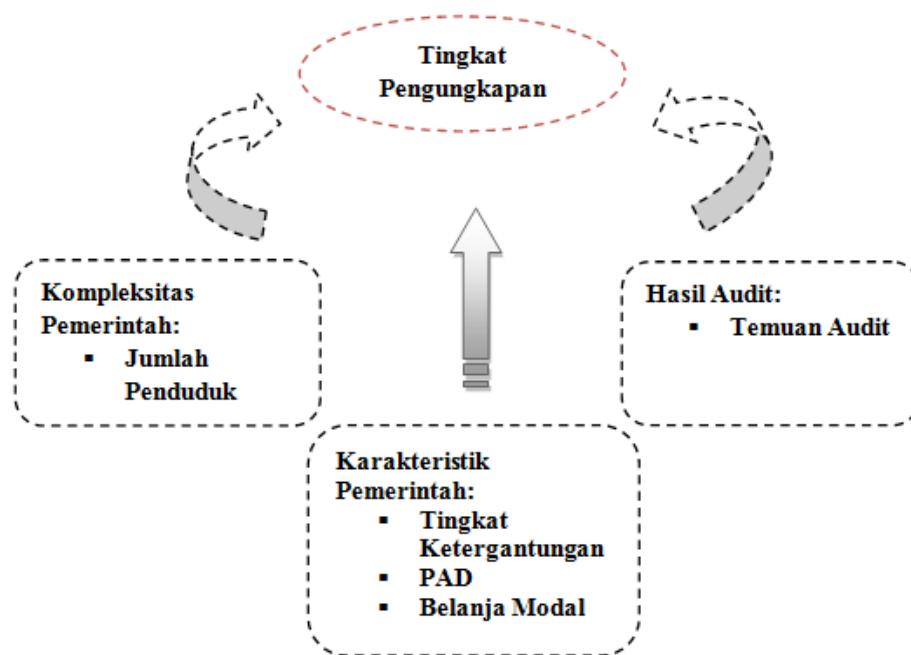
Temuan Audit

Martani dan Lestari (2010) menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian Hilmi (2011) dan Zulfikar (2013) memberi hasil yang berbeda, yaitu jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Dengan adanya temuan ini, maka BPK akan meminta melakukan koreksi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka semakin besar jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

H5: Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

Model Penelitian



Grafik 1.1 Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Hipotesis diatas diuji dalam sebuah model regresi berikut:

$$DISC_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 DEPEND_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 POP_{it} + \beta_5 FIND_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

DISC_{it} = Tingkat pengungkapan LKPD

DEPEND_{it} = Tingkat ketergantungan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

POP = Jumlah populasi / penduduk

FIND = Jumlah temuan Audit

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD provinsi di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Di Indonesia saat ini terdapat 34 provinsi. Sampel dipilih berdasarkan ketersediaan data LKPD pemerintah provinsi selama tiga tahun dan data jumlah penduduk selama tiga tahun. Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Data mengenai LKPD pemerintah provinsi didapat dari BPK RI. Sedangkan jumlah penduduk diperoleh dari Buku Statistik Indonesia 2012, 2013 dan 2014. Buku Statistik Indonesia tersebut bisa diperoleh di perpustakaan BPS. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan analisis data panel.

Analisis Hasil Penelitian

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang berjumlah 34 Provinsi. Berdasarkan populasi tersebut, diperoleh 90 data dari 30 Provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria *sampling* berdasarkan metode *purposive sampling*. Terdapat 4 provinsi yang tidak memenuhi kriteria yaitu provinsi Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.

Berdasarkan tabel-1, rata-rata tingkat pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan selama tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah 41,7663%.

Pengujian Hipotesis Satu

Berdasarkan tabel 4.9., variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,084 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), sehingga variabel tingkat ketergantungan terbukti memiliki pengaruh namun pengaruh yang negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, dengan demikian hipotesis satu ditolak.

Pengujian Hipotesis Dua

Berdasarkan tabel 4.9., variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,034 dengan signifikansi sebesar 0,150 lebih besar dari α (0,05), sehingga

variabel PAD terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan LKPD, dengan demikian hipotesis dua ditolak.

Pengujian Hipotesis Tiga

Berdasarkan tabel 4.9., variabel belanja modal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,126 dengan signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari α (0,05), sehingga variabel belanja modal terbukti berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan LKPD, dengan demikian hipotesis tiga diterima.

Pengujian Hipotesis Empat

Berdasarkan tabel 4.9., variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,947 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05), sehingga variabel jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif terhadap variabel tingkat pengungkapan LKPD, dengan demikian hipotesis empat diterima.

Pengujian Hipotesis Lima

Berdasarkan tabel 4.9., variabel temuan audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,011 dengan signifikansi sebesar 0,208 lebih besar dari α (0,05), sehingga variabel temuan audit terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan LKPD, dengan demikian hipotesis lima ditolak.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan

Hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD namun pengaruhnya negatif, artinya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tidak bergantung pada besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima setiap daerahnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liestiani (2008), Martani dan Lestari (2010), Puspita (2011) dan Hilmi (2011) yang menemukan bahwa besaran tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh

bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan

Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tidak bergantung pada besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita (2011) yang menemukan bahwa pemerintah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tidak secara otomatis melakukan pengungkapan dengan konten informasi yang tinggi.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Amalia (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah termasuk tingkat pengungkapan didalamnya.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengungkapan

Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, artinya semakin tinggi belanja modal pemerintah provinsi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan.

Hasil penelitian ini didukung oleh UU No 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Semakin tinggi belanja maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dkk (2012) dan Zulfikar (2013).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2011) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan, presentasi pengungkapan dan total pengungkapan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan

Hasil penelitian hipotesis keempat menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran yang menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut sehingga semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan.

Hasil penelitian ini didukung UU No 33 Tahun 2004 pasal 28 bahwa besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan pelayanan publik disetiap daerah. Maka, semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah semakin tinggi pula dorongan untuk melakukan pengungkapan mengingat fungsi pemerintah sebagai absdi masyarakat.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011) dan Puspitan dan Martani (2011) yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah provinsi.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan

Hasil penelitian hipotesis kelima menunjukkan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Artinya, besarnya jumlah temuan audit tidak memengaruhi tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal tersebut disebabkan karena BPK akan memberikan saran kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki temuan-temuan audit yang mereka temukan, dengan adanya perbaikan maka opini yang diberikan akan mendapatkan

opini wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2011) yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2013) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja yang didalamnya termasuk tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah provinsi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat di tarik kesimpulan bahwa Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan, karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan opini wajar, bukan dalam hal kualitas pengungkapan.

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kekayaan suatu daerah tidak akan secara otomatis melakukan pengungkapan informasi yang tinggi pula.

Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi belanja yang dikeluarkan maka semakin banyak pula bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan dorongan pengungkapan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sebagai wujud pengabdian.

Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan proksi dari tingkat kompleksitas pemerintah. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin kompleks pemerintahan tersebut

sehingga semakin tinggi tingkat pengungkapannya.

Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan karena BPK akan memberikan saran kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki temuan-temuan audit yang mereka temukan, dengan adanya perbaikan maka opini yang diberikan akan mendapatkan opini wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dan direkomendasikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian berikutnya diharapkan menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar hasil penelitian dapat lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti pengungkapan wajib melainkan ditambah dengan meneliti pengungkapan suka rela. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel kontrol sebagai alat monitoring pemerintah provinsi dalam melakukan pengungkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Adisasmita Rahardjo (2010) “*Manajemen Pemerintah Daerah*” Makasar: Graha Ilmu
- Amalia Aun Sauma (2014) “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa, Sumatra dan Kalimantan Tahun Anggaran 2011*” Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Aries Sadhar (2013) “*Pedoman Audit Sistem Manajemen: Penetapan Tujuan Program Audit*” <http://www.google.com> diakses tanggal 13 Februari 2013
- Arifin Imam (2013), “*Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil audit*

- BPK” Simposium Nasional Akuntansi 2014, Universitas Indonesia
- Damang (2011) “Pendapatan Asli Daerah” <http://www.negarahukum.com> diakses tanggal 14 November 2011
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, www.perbendaharaan.go.id
- Evans, J, Patton, J 1987. “*Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting Journal of Accounting Research*” 25 (Supplement) 130-158
- Fadzil, Faudziah Hanim dan Nyoto (2011) “*Fiscal Decentralitation after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*” *World Review of Business Research* vol 1 No 2 PP 51 - 70
- Hafidh Susila Sudarsana (2013) “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di indonesia)*” Skripsi 2013, Universitas Diponegoro
- Hilmi, Amiruddin Zul (2011), “*Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*” Simposium Nasional Akuntansi 2012, Universitas Indonesia
- Jensen and Meckling (1976) “*Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*” Scribd
- Keputusan Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Tahunan
- Liestiani Annisa (2008), “*Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*” Skripsi Sarjana. Universitas Indonesia
- Martani, Dwi dan Lestari, Annisa (2010), *Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia*, Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association, Thammasat Business School.
- Pengertian, Jenis dan Manfaat Disclosure / Pengungkapan Laporan Keuangan, <http://www.google.com> diakses tanggal 16 Juni 2010
- PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- PP No 58 tahun 2005 tentang Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
- Roro Puspita dan Martani (2011), “*Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*” Skripsi S1 Universitas Indonesia
- Soemarso, S.R.2003. Akuntansi Suatu Pengantar (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat
- Sony Lazio (2012) “*Pengertian dan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah*” diakses tanggal 23 Juni 2012
- Standar Akuntansi Pemerintah, <http://www.ksap.org>. Diakses 18 September 2007
- <https://romannurbawastore.wordpress.com/2012/05/08/pengertian-jenis-dan-manfaat-disclosure-pengungkapan-laporan-keuangan/>
- Supriyanto Joko (2007), “*Standar Akuntansi Pemerintah*” <https://abusyadza.wordpress.com> diakses tanggal 18 September 2007
- UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
- UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tnggung Jawab Keuangan Negara

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Zulfikar (2013), “Pengaruh Karakteristik PEMDA berupa ukuran PEMDA, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, dan

belanja daerah serta temuan audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada Anggaran 2007” Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

LAMPIRAN

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Data

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tingkat_Pengungkapan	80	30,43	52,17	41,7663	5,11519	26,165
Tingkat_Ketergantungan	80	,19	63,83	27,6370	18,25049	333,080
PAD	80	4,19	71,36	39,7724	18,78158	352,748
Belanja_Modal	80	6,53	36,95	19,6903	7,37352	54,369
Jumlah_Penduduk	80	6,69	10,74	8,3978	1,03545	1,072
Temuan_Audit	80	1,04	272,40	16,7510	33,07020	1093,638
Valid N (listwise)	80					

Sumber : Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS v.15.0

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,687	4,215		3,722	,000
	Tingkat_Ketergantungan	-,084	,018	-,299	-4,547	,000
	PAD	,034	,024	,126	1,455	,150
	Belanja_Modal	,126	,039	,181	3,234	,002
	Jumlah_Penduduk	2,947	,478	,596	6,170	,000
	Temuan_Audit	-,011	,009	-,071	-1,271	,208

a. Dependent Variable: Tingkat_Pengungkapan

Sumber: Hasil pengolahan data statistik dengan SPSS v.15